

## **PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI KELOMPOK SOSIAL DI MASYARAKAT DESA BANJARASEM**

**M. Rudi Irwansyah, Kadek Rai Suwena, I Putu Arya Dharmayasa**

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: rudi.irwansyah@undiksha.ac.id

### **ABSTRACT**

*The aim of this community service activity is to provide an understanding of the importance of the internal control system in managing organizations and train social groups in the Banjarasem Village community in managing finances and keeping simple bookkeeping. This activity involved 20 participants who came from social group administrators in Banjarasem Village, Buleleng Regency, Bali. The result of this activity succeeded in increasing participants' understanding of the importance of internal control systems, recording and preparing financial reports for each social group.*

**Keywords:** *Internal control system, bookkeeping, managing finance*

### **ABSTRAK**

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman pentingnya sistem pengendalian internal dalam mengelola organisasi dan melatih kelompok sosial masyarakat Desa Banjarasem dalam mengelola keuangan dan membuat pembukuan sederhana. Kegiatan ini melibatkan 20 orang peserta yang berasal dari pengurus kelompok sosial yang ada di Desa Banjarasem, Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya sistem pengendalian internal, pencatatan dan pembuatan laporan keuangan masing-masing kelompok sosial.

**Kata kunci:** sistem pengendalian manajemen, pembukuan, pengelolaan keuangan

### **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Bali juga mengenal konsep Tri Hita Karana yang merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali meliputi: parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan antar-manusia), dan palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu Baghavad gita (Riana, 2010). Oleh karena itu, konsep Tri Hita Karana yang berkembang di Bali, merupakan konsep budaya yang berakar dari ajaran agama (Saputra, 2012) yang dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Didalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Bali, selain melihat potensi yang ada, pemerintah juga harus memperbaiki tatanan sosial masyarakat setempat, budaya, dan mental. Tri Hita Karana yakni akuntabilitas manusia kepada Tuhan, akuntabilitas manusia kepada stakeholders/sesama dan akuntabilitas manusia terhadap alam.

Dalam Akuntansi keperilakuan, hal seperti ini disebut dengan *religious effect (the consequential dimension)* yang berarti bahwa dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya, sehingga menjadikan nilai-nilai ajaran agama sebagai tolak ukur keberhasilannya (Pamungkas, 2014). Hal ini juga berlaku pada etika untuk pengelolaan keuangan desa yang wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penggelapan dana desa (Atmadja & Saputra, 2017).

Sudah banyak yang melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat terkait pengelolaan dana desa, tetapi belum banyak yang menaruh perhatian kepada kelompok sosial di masyarakat desa. Masyarakat desa di Bali, sebagaimana halnya masyarakat pada umumnya, juga memiliki pranata sosial, antara lain berupa Desa Dinas, Desa Adat, dan

kelompok-kelompok sosial lainnya seperti kelompok pemuja leluhur disebut kelompok dadia, kelompok petani disebut subak, dan kelompok lain yang disebut sekaa. Pranata sosial ini berfungsi menghimpun masyarakat menjadi para anggotanya, sehingga keputusan mengenai berbagai hal termasuk keputusan untuk menerima dan/atau menolak berpartisipasi dalam suatu program pembangunan kerap dilakukan melalui fungsi pranata sosial seperti itu, misalnya keputusan rapat. Kelompok sosial tersebut juga menghimpun dan mengelola dana baik yang berasal dari dana desa maupun iuran masyarakat desa. Kelompok sosial masyarakat desa juga memerlukan komitmen organisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Menurut Kreitner & Kinicki (2014) bahwa komitmen organisasi adalah cerminan dimana seorang karyawan dalam mengenali organisasi dan terikat kepada tujuan-tujuannya. Melizawati (2015) menyatakan komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang bertujuan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Tingginya komitmen individu menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha membawa organisasi menjadi lebih baik. Rendahnya komitmen organisasi akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya. Sementara itu, untuk membuat suatu organisasi yang memiliki akuntabilitas terhadap pengelolaan dana dan pengelolaan organisasi menjadi efektif dan efisien, sehingga tercapainya tujuan organisasi, maka memerlukan pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2018) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa juga memiliki kelompok-kelompok sosial yang

menghimpun masyarakat desa untuk menjadi anggotanya dalam berbagai kegiatan. Masyarakat desa Di Bali juga memiliki pranata atau kelompok sosial, antara lain berupa Desa Dinas, Desa Adat, dan kelompok-kelompok sosial lainnya seperti kelompok pemuja leluhur disebut kelompok dadia, kelompok petani disebut subak, dan kelompok lain yang disebut sekaa.

Di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali juga memiliki kelompok sosial, seperti Sekaa Suka Duka, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Jumantik (Juru Jentik), Kader RDS (Rumah Desa Sehat), dan TKP (Tim Pendamping Keluarga). Kelompok sosial tersebut mengelola dana untuk aktivitasnya baik yang berasal dari dana pemerintah desa, hibah maupun iuran anggota. Namun sayangnya, menurut kepala Desa Banjarasem, I Made Sirsa, S.Pd., M.Pd., kelompok-kelompok sosial tersebut belum memiliki pelaporan yang memadai sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa maupun pemerintah desa.

Keresahan terhadap pengelolaan keuangan kelompok sosial tersebut berkaca pada kasus korupsi yang terjadi di Desa Banjarasem dimana Penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Buleleng menahan mantan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Mandara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana BUMDes saat masih menjabat sebagai bendahara di usaha desa tersebut yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 274 juta lebih. Jumlah tersebut berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (Balipost, 2023). Dengan adanya kasus korupsi tersebut, kepala desa merasa perlu untuk kelompok-kelompok sosial tersebut untuk belajar mengelola keuangan dan pelaporannya, sehingga kepercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa maupun kelompok sosialnya bisa pulih.

## **METODE**

Program Kemitraan Masyarakat ini akan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif para pengurus kelompok sosial di masyarakat Desa banjarasem sejumlah 20 orang peserta. Kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan dan

pembukuan sederhana akan dipandu oleh instruktur dari Universitas Pendidikan Ganesha sebagai pemateri. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan pra-kegiatan, tahapan inti kegiatan dan tahapan pasca-kegiatan sebagaimana dirinci sebagai berikut:

### **Sosialisasi dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan bagi Kelompok Sosial di Masyarakat Desa Banjarasem**

- a. Overview peran dan manfaat pengelolaan keuangan bagi kelompok sosial masyarakat desa;
- b. Pengenalan dokumen yang diperlukan sebagai bentuk administrasi pengelolaan keuangan;

### **Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Pembukuan Sederhana**

- a. Pemberian materi fungsi pembukuan dan pelaporan keuangan
- b. Pemberian materi pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal
- c. Pemberian materi pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan

### **Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Pendampingan dan evaluasi praktik pengelolaan keuangan
- b. Pendampingan dan evaluasi praktik pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

## **HASIL KEGIATAN**

Hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan pada kelompok sosial masyarakat Desa Banjarasem, Kabupaten Buleleng yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan pada kelompok sosial Masyarakat Desa Banjarasem dilaksanakan pada 28 Agustus 2023 di aula kantor Desa Banjarasem. Adapaun rincian pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pembukaan kegiatan yang diisi dengan sambutan ketua tim pengabdian dan kepala desa Banjarasem untuk menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan kepada para peserta
- b) Pemberian materi oleh narasumber
- c) Diskusi. Pada sesi ini, para peserta diberikan kesempatan bertanya mengenai topik yang dibahas oleh narasumber
- d) Penutup, moderator menyimpulkan materi dan hasil diskusi yang sudah dilakukan dan pemberian kenang-kenangan kepada kepala desa Banjarasem

2. Inti kegiatan pertama, narasumber memaparkan materi tentang sistem pengendalian internal terkait pengelolaan keuangan kelompok sosial di Desa Banjarasem. Narasumber memaparkan pentingnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi yaitu agar tujuan organisasi dapat tercapai dan pengelolaan organisasi bisa lebih efektif dan efisien. Dalam hal pengelolaan keuangan, hal penting yang dilakukan dalam sistem pengendalian internal, yaitu pertama adanya pemisahan tugas dan wewenang yang memadai terutama pihak yang mengotorisasi, memegang uang kas, dan mencatat transaksi. Kedua, adanya otorisasi yang memadai terutama terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Ketiga, adanya pencatatan dan dokumen yang memadai. Artinya organisasi harus mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dan membuat dokumen bukti transaksinya. Keempat, adanya pemeriksaan fisik oleh pihak yang independen dan dilakukan secara rutin. Ini berkaitan dengan pengelolaan aktiva tetap dan aset milik organisasi.

3. Inti kegiatan kedua, disampaikan oleh narasumber kedua yang membahas mengenai pengelolaan keuangan pada kelompok sosial masyarakat Desa Banjarasem. Sebelum memulai memaparkan materi, narasumber menggali informasi tentang pengelolaan keuangan masing-masing kelompok sosial yang selama ini dilakukan. Hampir 80% peserta

tidak melakukan pembukuan yang rutin dan memadai dikarenakan dana yang mereka kelola tidak besar dan tidak ada pertanggungjawaban secara formal yang jelas. Narasumber menyampaikan bahwa sekecil apapun dana yang dikelola, selama itu merupakan dana milik dan untuk masyarakat, maka wajib untuk membuat pembukuan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kelompok sosial kepada masyarakat. Selain itu, jika ada dana lebih yang tersimpan, bisa dikembangkan untuk program atau kegiatan lainnya yang bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga kelompok sosial yang ada mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan kegiatan-kegiatan lain diluar zona nyaman kelompok sosial selama ini.

4. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian dengan langsung mencoba menyusun pembukuan dengan aplikasi excel. Peserta terlihat sangat antusias karena mereka merasa menggunakan aplikasi lebih mudah dan cepat, meskipun beberapa masih ada yang terkendala karena usia sehingga takut menekan tombol atau menu pada excel.

Berikut adalah beberapa hasil dokumentasi selama kegiatan:



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial masyarakat Desa Banjarasem belum memiliki pencatatan dan pembukuan yang memadai terkait transaksi yang terjadi selama ini. Pencatatan hanya dilakukan ketika adanya pemeriksaan dari dinas terkait dan tidak dilakukan pengarsipan yang memadai. Dengan kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya membangun sistem

pengendalian internal dan pembukuan yang memadai, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai tujuan kelompok sosial masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi Sistem pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan keuangan Desa yang Dimoderasi oleh Moralitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Balipost. (2023). *Bendahara BUMDES Banjarasem Mandara Ditahan*. <https://www.balipost.com/news/2023/02/21/324373/Bendahara-BUMDes-Banjarasem-Mandara-Ditahan.html>
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku Organisasi Edisi 9*. Salemba Empat.
- Melizawati. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus Pada PT. Indotirta Abadi DI Gempol Pasuruan). *Jurnal Akuntansi*, 3(3), 1–17.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*. UPP AMP YKPN.
- Pamungkas, I. D. (2014). Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59.
- Riana, I. G. (2010). *Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada IKM Kerajinan perak di bali)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Saputra, K. A. K. (2012). Analisis Pengaruh Locus of Control terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Internal Auditor dengan Kultur Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi (Penelitian Terhadap Internal Auditor Hotel berbintang di Bali). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 1–15.